

IMPLIKASI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA WISATA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Oleh:
Andrian Hanturri
NIM. 2205040010

ABSTRAK

Penyalahgunaan visa wisata oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri merupakan permasalahan yang menimbulkan persoalan hukum keimigrasian dan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pidana terhadap PMI yang menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa wisata serta mengkaji penerapan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta wawancara dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dan UPT BP2MI Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa wisata untuk bekerja merupakan bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian karena tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan tersebut juga dapat berkaitan dengan pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses memperoleh dokumen perjalanan apabila tujuan sebenarnya untuk bekerja disamarkan sebagai kegiatan wisata. Apabila dalam praktiknya terdapat unsur kesengajaan, pemberian keterangan yang tidak benar, penyalahgunaan dokumen perjalanan, atau pemberangkatan PMI secara nonprosedural, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penegakan hukum, penindakan lebih diarahkan kepada pihak yang merekrut, menempatkan, atau memberangkatkan PMI secara nonprosedural karena memiliki peran aktif dalam memfasilitasi keberangkatan tersebut. Kesimpulannya, penyalahgunaan visa wisata dapat menimbulkan akibat hukum pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi, sehingga diperlukan penguatan pengawasan keimigrasian, edukasi hukum kepada calon PMI, serta koordinasi antarinstansi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan visa wisata dan keberangkatan PMI secara nonprosedural.

Kata Kunci: Visa wisata, PMI nonprosedural, akibat hukum pidana.

CRIMINAL IMPLICATIONS OF THE MISUSE OF TOURIST VISAS BY INDONESIAN MIGRANT WORKERS

By:
Andrian Hanturri
NIM. 2205040010

ABSTRACT

The misuse of tourist visas by Indonesian migrant workers (PMI) to work abroad is an issue that raises both immigration and criminal law concerns. The research question in this study is: What are the criminal law consequences for PMI who misuse tourist visas to work abroad? This study aims to analyze the criminal legal consequences of tourist visa misuse and to examine the application of legal provisions governing such acts. The method used is a normative-empirical legal study. Data were obtained through a literature review of laws and regulations as well as legal literature, and interviews with the Tanjungpinang Class I TPI Immigration Office and the Tanjungpinang BP2MI Field Office. The results of the study indicate that using a tourist visa for work constitutes a form of misuse of an immigration permit because it does not align with the purpose for which it was issued and violates applicable legal provisions. Such misuse may also involve providing false information during the process of obtaining travel documents when the actual purpose of working is disguised as tourism. If, in practice, there are elements of intent, the provision of false information, the misuse of travel documents, or the non-procedural dispatch of migrant workers, then such acts may result in criminal legal implications in accordance with applicable laws and regulations. In law enforcement practice, enforcement actions are primarily directed at parties that recruit, place, or dispatch migrant workers in violation of procedures, as they play an active role in facilitating such departures. In conclusion, the misuse of tourist visas can result in criminal penalties if the elements of a criminal offense are met; therefore, it is necessary to strengthen immigration oversight, provide legal education to prospective migrant workers, and enhance interagency coordination to prevent the misuse of tourist visas and the non-procedural departure of migrant workers.

Keywords: Tourist visa, non-procedural Indonesian migrant workers, criminal legal consequences.